SIARAN PERS

TANGGAL:
2 November 2026

Nomor: 39/HMS/SP/XI/2026

Politik Uang Digital hingga Hoaks, Bawaslu dan DPRD Kabupaten Gorontalo Bahas Tantangan Pengawasan Pemilu

Limboto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo – Perkembangan teknologi digital dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu ke depan. Hal tersebut menjadi perhatian dalam konsolidasi demokrasi antara Bawaslu Kabupaten Gorontalo dan Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo di Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo, Senin (2/11/2026).

Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Under S. Lawani, mengungkapkan bahwa keterbatasan personel masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan, terutama pada masa tenang hingga tingkat bawah. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru yang perlu diantisipasi, termasuk potensi praktik politik uang melalui transaksi digital.

“Tantangan ke depan adalah perkembangan digitalisasi yang semakin canggih. Kita perlu mengantisipasi kemungkinan praktik politik uang melalui transaksi digital, seperti QRIS maupun pengisian saldo dompet elektronik,” ungkap Under.

Selain politik uang digital, konsolidasi tersebut turut membahas isu netralitas aparatur sipil negara (ASN), penyebaran isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta hoaks melalui media sosial. Berbagai isu tersebut memerlukan perhatian dan penguatan strategi pencegahan agar tidak mengganggu kualitas penyelenggaraan Pemilu.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Rivon Kadir Ui, S.E., mengapresiasi langkah Bawaslu dalam membangun koordinasi dengan DPRD. Ia menilai komunikasi antarlembaga penting untuk mendukung pengawasan Pemilu yang sesuai dengan asas dan prinsip demokrasi.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Yunus Dunggio, menekankan pentingnya meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya sosialisasi mengenai pemilih cerdas dan penolakan terhadap politik uang.

“Politik uang merupakan musuh bersama. Karena itu, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjadi pemilih cerdas dan menolak politik uang perlu terus diperbanyak,” kata Yunus.

Yunus juga mendorong sinergi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, KPU, dan Bawaslu dalam memantapkan data pemilih untuk mendukung suksesnya Pemilu 2029. Selain itu, keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam pencalonan turut menjadi perhatian dalam diskusi.

Dari unsur staf ahli Komisi I, disampaikan pula pentingnya mengoptimalkan upaya pencegahan agar potensi pelanggaran Pemilu dapat diminimalkan. Perkembangan wacana pemisahan Pemilu nasional dan Pemilu lokal seiring proses revisi undang-undang Pemilu juga menjadi salah satu isu yang dicermati.

Konsolidasi demokrasi ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Gorontalo untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi pengawasan Pemilu sebelumnya serta penguatan strategi menghadapi penyelenggaraan Pemilu mendatang.

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo diwakili oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Under S. Lawani dan Zulfikar A. Uba. Sementara dari DPRD hadir Ketua Komisi I, Rivon Kadir Ui, S.E., anggota Komisi I Muhlis Panai dan Yunus Dunggio, serta staf ahli dan pakar hukum Komisi I.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kabupaten Gorontalo
Jl. Kolonel Rauf Mo’o No.1, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo
Email: humasbawaslukabgor@gmail.com
Situs: gorontalokab.bawaslu.go.id